

PENDIDIKAN NASIONAL (LANDASAN, TUJUAN, DAN SEJARAHNYA)

Sunarso

Jurusan PKn dan Hukum, FISE, UNY.

Abstract

Education is about people learning. Education have character: (1) The total processes developing human ability and behavior; (2) Social process in which one achieves social competence and individual growth, carried on in a selected, controlled setting, which can be institutionalized as a school or college; (3) In the sense of theory of education or disciplines of education; (4) According to UNESCO, organized and sustained instruction designed to communicate a combination of knowledge, skill and understanding valuable for all the activities of life

Education is equated with what takes place in a formal institution of learning. But except we know what exactly takes place within a school situation, we cannot really grasp the full meaning of statement. Perhaps, having ourselves gone through the process of attending one school or two, we may have some idea of what goes on within the school walls, but it is still an important question as to how what goes on there is educational. Which of the thousand and one activities that take place during a student's life in a school can we call education.

However, what is of concern to us here in this first use of the concept of education is that the claim that man had his education in a certain school only describes the man or gives us some information about him. But I suggest that this information is meaningless unless we know first and foremost what education is or what it is for a person to be educated. In other words, the concept of education is still not unfolded.

Kata kunci: pendidikan nasional, landasan pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional, sejarah pendidikan nasional.

Pendahuluan

Pendidikan adalah suatu proses panjang dalam rangka mengantarkan manusia untuk menjadi seorang yang memiliki kekuatan intelektual dan spiritual, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya di segala aspek dan menjalani kehidupan yang bercita-cita dan bertujuan pasti. Pendidikan, pada hakekatnya adalah usaha mempersiapkan anak-anak dan pemuda untuk menyambut zaman yang akan datang, dengan memberinya ilmu pengetahuan dan memberanikan hatinya untuk memenuhi tuntutan zamannya. Karena itu, pendidikan merupakan unsur yang terpenting untuk membina suatu masyarakat (Ahmad Syafii Maarif, 2004).

Dilihat dari segi sejarah, pendidikan merupakan suatu gerakan yang telah berumur sangat tua. Dalam bentuk yang sederhana dapat dipahami bahwa pendidikan telah dijalankan sejak dimulainya kehidupan manusia di muka bumi. Untuk era generasi manusia abad 21, pendidikan yang berlangsung telah demikian modern, sehingga sangat membedakannya dengan proses pendidikan yang pernah berlangsung sebelumnya. Oleh karena itu, siapapun tidak akan pernah bisa membantah tentang pentingnya posisi pendidikan. Kemajuan dan kemunduran suatu bangsa antara lain sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan bangsa yang bersangkutan. Tingkat pendidikan yang dicapai suatu bangsa akan menempatkan bangsa itu pada suatu posisi tertentu dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa lain. Pada saat yang bersamaan, pendidikan akan mengantarkan para pemiliknya pada suatu peradaban tertentu. Bukankah tahap-tahap perkembangan peradaban manusia dari satu waktu ke waktu yang lain berkorelasi signifikan dengan tingkat pengetahuan manusianya.

Tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk “mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (UU No. 20 Tahun 2003). Dari tujuan pendidikan di atas mengandung pesan yang pertama adalah pengembangan karakter, akhlak mulia, atau kepribadian, setelah itu baru pengembangan sumber daya manusia.

Fungsi Pendidikan Nasional adalah untuk “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab” (UU No. 20 Tahun 2003).

Pengertian Pendidikan

Walaupun kata pendidikan sudah sangat akrab dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekarang ini, tetapi hakikat atau maknanya masih menimbulkan perdebatan. Keragaman pemaknaan pendidikan tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum, tetapi juga terjadi di kalangan para ahli pendidikan. Masing-masing ahli memiliki definisi

pendidikan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Keragaman definisi ini sebenarnya merupakan hal yang wajar, karena antara satu orang ahli dengan ahli yang lainnya memiliki berbagai perbedaan, terutama perbedaan latar belakang baik latar belakang sosial, pendidikan, budaya, agama, maupun latar belakang lainnya.

Pengertian pendidikan erat kaitannya dengan kata *education*. Kata *education* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan pendidikan merupakan kata benda turunan dari kata kerja bahasa Latin *educare*. Kata *educare* dalam bahasa Latin memiliki pengertian melatih, menuburkan. Pendidikan merupakan sebuah proses yang membantu menumbuhkan, mengembangkan, mendewasakan, membuat yang tidak tertata atau liar menjadi semakin tertata, semacam proses penciptaan sebuah kultur dalam diri seseorang. Pendidikan juga berarti proses pengembangan berbagai macam potensi yang ada dalam diri manusia, seperti kemampuan akademis, relasional, bakat, talenta, kemampuan fisik, dan daya seni (Doni Koesoema, 2007: 54).

Secara historis kata pendidikan banyak dipakai untuk mengacu pada berbagai macam pengertian, misalnya pembangunan, pertumbuhan, perkembangan, sosialisasi, inkulturasi, pengajaran, pelatihan, pembaruan. Kata pendidikan juga melibatkan interaksi dengan berbagai macam lingkungan seperti keluarga, sekolah, pesantren, gereja, yayasan dan sebagainya. Meskipun memiliki berbagai makna, pendidikan merupakan sebuah kegiatan manusiawi. Tindakan mendidik memang secara khas hanya berlaku bagi sebuah kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Inilah kekhasan yang membedakan kita dengan binatang. Sebagai sebuah kegiatan manusiawi, pendidikan membuat manusia membuka diri terhadap dunia. Manusia berkembang melalui kegiatan membudaya dalam memaknai sejarahnya di dunia ini, memahami kebebasannya yang selalu ada dalam situasi agar mereka semakin mampu memberdayakan dirinya.

Dalam konteks modern, pendidikan senantiasa diletakkan dalam kerangka kegiatan dan tugas yang ditujukan bagi sebuah generasi yang sedang ada dalam masa-masa pertumbuhan. Oleh karena itu pendidikan lebih mengarahkan dirinya pada pembentukan kepribadian individu. Proses pembentukan diri terus menerus ini terjadi dalam kerangka ruang dan waktu. Pendidikan dengan demikian mengacu pada setiap bentuk pengembangan diri yang bersifat persuasi, terus menerus, tertata rapi dan

terorganisasi, berupa kegiatan yang terarah untuk membentuk kepribadian secara personal, sosial, dan mondial. (Doni Koesoema. 2007: 54).

Darmaningtyas mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik (Darmaningtyas, 2004: 1) Titik tekan dari definisi ini terletak pada usaha sadar dan sistematis. Dengan demikian, tidak semua usaha memberikan bekal pengetahuan kepada anak didik dapat disebut pendidikan jika tidak memenuhi kriteria yang dilakukan secara sadar dan sistematis.

Sementara ahli antropologi Indonesia Koentjaraningrat mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar untuk mengalihkan adat istiadat dan seluruh kebudayaan dari generasi lama ke generasi baru (M. Said. 1989: v). Definisi yang dibuat Koentjaraningrat ini sarat dengan nuansa budaya, karena beliau adalah ahli antropologi.

Definisi dengan nuansa filosofis terlihat pada rumusan J. Sudarminta yang memaknai pendidikan secara luas dan umum sebagai usaha sadar yang dilakukan pendidik melalui bimbingan pengajaran, dan latihan untuk membantu anak didik mengalami proses pematangan diri kearah tercapainya pribadi yang dewasa susila. Kata pendidikan sekurang-kurangnya mengandung empat pengertian, yakni sebagai bentuk kegiatan, proses, buah atau produk yang dihasilkan oleh proses tersebut, dan sebagai ilmu (Darmaningtyas, 1999: 3).

Senada dengan J. Sudarminta, pakar filsafat Indonesia, N. Drijarkara juga memberikan definisi pendidikan dengan nuansa filosofis. Pendidikan dalam pandangan Drijarkara adalah suatu perbuatan fundamental dalam bentuk komunikasi antarpribadi, dan dalam komunikasi tersebut terjadi proses pematangan manusia muda, dalam arti terjadi proses hominisasi (proses menjadikan seseorang sebagai manusia) dan humanisasi (proses pengembangan kemanusiaan manusia). Dengan demikian, pendidikan harus membantu orang agar tahu dan mau bertindak sebagai manusia (Drijarkara, 1980: 87).

Sementara Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, merumuskan hakikat pendidikan sebagai usaha orang tua bagi anak-anaknya dengan maksud untuk menyokong kemajuan hidupnya, dalam arti memperbaiki tumbuhnya kekuatan rohani dan jasmani yang ada pada anak-anak (Drijarkara, 1980: 4).

Perspektif yang berbeda diberikan oleh tokoh pendidikan pembebasan asal Brasil, Paulo Freire. Menurut Freire, pendidikan merupakan jalan menuju pembebasan yang

permanen dan terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah masa di mana manusia menjadi sadar akan pembebasan mereka, dan melalui praksis mengubah keadaan itu. Tahap kedua dibangun di atas tahap yang pertama, dan merupakan sebuah proses tindakan kultural yang membebaskan (Denis Collins, 1999: 39).

Jika kita cermati satu persatu dari definisi-definisi pendidikan di atas, terlihat dimensi yang berbeda antar definisi. Namun demikian, dari keragaman perbedaan tersebut, ada titik kesamaan yang dapat dianggap sebagai titik temu. Setidaknya titik temu tersebut diwakili oleh aspek proses menuju kedewasaan dan memanusiakan manusia. Di luar kedua dimensi ini, memang ada kesamaan dan juga perbedaan antara satu pendapat dengan pendapat yang lainnya. Keragaman ini merupakan kewajaran dan tidak perlu diperdebatkan, sebab secara substansial sebenarnya terdapat titik temu dari beragam definisi yang ada.

Pendidikan merupakan sebuah fenomena antropologis yang usianya hampir setara dengan sejarah manusia itu sendiri. Niccolo Machiavelli memahami pendidikan dalam kerangka proses penyempurnaan diri manusia secara terus menerus. Ini terjadi karena secara kodrati manusia memiliki kekurangan dan ketidaklengkapan. Baginya, intervensi manusiawi melalui pendidikan merupakan salah satu cara bagi manusia untuk melengkapi apa yang kurang dari kondisinya. Pendidikan dapat melengkapi ketidaksempurnaan dalam kodrat alamiah manusia, tulis Machiavelli (Doni Koesoema, 2007: 52).

Landasan Pendidikan Nasional

Negara Republik Indonesia mempunyai aneka peraturan perundang-undangan yang berlaku. UUD 1945 adalah bentuk hirarkhi peraturan perundang-undangan yang tertinggi, dibawahnya adalah peraturan perundang-undangan lainnya seperti Ketetapan MPR, UU, Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan lain-lain (Arif Rohman 2009: 47).

Dalam rangka menciptakan tertib hukum dan tegaknya hukum di Indonesia khususnya yang mengatur penyelenggaraan pendidikan, bangsa Indonesia telah memiliki beberapa undang-undang tentang pendidikan nasional yang silih berganti. Antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 1954 tentang Pemberlakuan UU Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk seluruh Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 19 PRPS Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketujuh undang-undang tersebut menjadi regulator yang mengatur seluk beluk penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Bahkan ada terobosan baru dalam rangka mengatur dan meningkatkan profesionalitas guru dan dosen, yakni telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Dalam konteks global, regulasi dalam penyelenggaraan pendidikan muncul dari hasil-hasil beberapa konferensi internasional tentang pendidikan, antara lain seperti konferensi internasional tentang pendidikan, antara lain seperti konferensi internasional pendidikan yang pernah disponsori UNICEF dan UNESCO yang diadakan di Karachi (1960), Santiago (1962), Adis Ababa (1965), Seoul (1966), dan tempat-tempat lain yang berlangsung kemudian yang pada akhirnya menghasilkan resolusi-resolusi. Salah satu bunyi resolusi terpenting dari beberapa konferensi tersebut adalah agar di Asia dan Afrika dilaksanakan pendidikan universal atau yang kemudian populer dengan pendidikan untuk semua (*education for all*). Aneka konferensi tersebut merupakan komitmen dunia terhadap upaya peningkatan penyelenggaraan pendidikan (Arif Rohman 2009: 50).

UUD 1945 merupakan produk hukum tertinggi yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pasal-pasal yang bertalian dengan pendidikan dalam UUD 1945 tersebut adalah pasal 31 tentang pendidikan dan 32 tentang kebudayaan. Pasal 31 ayat (1) berbunyi: “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Pasal 31 ayat (2) berbunyi: “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Dua ayat pada pasal 31 UUD 1945 tersebut mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam mendapatkan pendidikan dan mengikuti pendidikan dasar. Mendapatkan pendidikan adalah hak yang harus diterima oleh warga negara dan negara wajib

memberikan hak tersebut berupa penyediaan layanan pendidikan secara cuma-cuma atau gratis. Dalam hal ini layanan yang bisa diberikan secara cuma-cuma baru pada level dasar yaitu sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama.

Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 berbunyi: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Pada pasal 31 ayat (4) berbunyi: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Ayat (5) berbunyi: “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia” (Arif Rohman 2009: 50).

Pasal 32 ayat (1) berbunyi: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Dua ayat pada pasal 32 UUD 1945 ini mengatur kewajiban negara untuk memajukan kebudayaan nasional sekaligus kewajiban memelihara bahasa dan kebudayaan daerah sebagai penopang kebudayaan nasional.

Selain UUD 1945, bangsa Indonesia mempunyai beberapa UU pendidikan yang khusus mengatur proses pengembangan penyelenggaraan pendidikan nasional. UU Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah, UU Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pemberlakuan UU Nomor 4 Tahun 1950 untuk seluruh Indonesia. Kedua UU ini mengatur bagaimana sekolah diselenggarakan di Indonesia. Salah satu pasal yang mengatur tujuan pendidikan adalah bahwa penyelenggaraan sekolah bertujuan untuk mewujudkan sosok manusia Indonesia yang susila, cakap, demokratis, dan dapat bertanggung jawab.

Pada saat itu bangsa Indonesia belum lama keluar dari jeratan penjajahan, kemudian disusul konflik internal antar kelompok ideologi politik juga menjadi kendala pembangunan. Sosok manusia Indonesia yang susila, cakap, demokratis, dan dapat bertanggung jawab sangat dibutuhkan. Pada tahun 1961 muncul UU baru yaitu UU Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi. UU ini di dalamnya terdapat 10 bab

dan 37 pasal yang mengatur keberadaan, peran, tugas, pokok, dan fungsi perguruan tinggi negeri maupun swasta. Pada akhir era pemerintahan Orde Lama muncul UU Nomor 14 PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional dan UU Nomor 19 PRPS Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila. Sedangkan pada era pemerintahan Orde Baru lahir UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan pada era reformasi lahir UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pengganti undang-undang sebelumnya (Arif Rohman 2009: 50).

Tujuan Pendidikan Nasional

Tujuan pendidikan sering dikemukakan untuk "pengembangan diri manusia secara utuh". Itu hanyalah salah satu dari banyak tujuan pendidikan yang bisa diajukan. Banyak perdebatan tentang tujuan pendidikan yang dilakukan oleh para ahli. Hal yang diperdebatkan berkaitan dengan titik pijak tujuan pendidikan itu sendiri. Dalam sejarah pendidikan ada banyak pendekatan untuk menentukan titik pijak bagi pendidikan, seperti idealisme, realisme, naturalisme, sosialisme dan lain-lain. Hal lain yang juga menjadi pokok perdebatan adalah tentang metodologi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, seperti positivis, historis, materialis, dialektis, dan sebagainya. (Doni Koesoema. 2007: 63). Proses menjadi manusia terjadi di dalam habitus kemanusiaan, yaitu alam sekitarnya, keanggotaannya di dalam keluarga yang melahirkannya, di lingkungan masyarakat lokal yang berbudaya, habitus sukunya yang memiliki adat istiadat dan tata kehidupan sendiri, dan akhirnya sebagai anggota masyarakat yang lebih luas yaitu masyarakat negaranya dan masyarakat umat manusia (Tilaar, 2005:110).

Pengkajian tentang proses menjadi manusia di dalam habitus kemanusiaan tersebut memerlukan dukungan ilmu-ilmu lainnya, ilmu pendidikan bersifat multidisiplin. Pengamatan terhadap ilmu pendidikan yang dilakukan secara cermat akan tampak dengan jelas bahwa terdapat faktor-faktor seperti peserta didik, pendidik, cita-cita dan tujuan pendidikan, lingkungan, serta alat-alat pendidikan. Ilmu pendidikan memerlukan filsafat pendidikan, psikologi pendidikan, sosiologi pendidikan, dan sosio kultural sebagai fondasinya. Fondasi-fondasi yang berasal dari beberapa disiplin itu untuk menjadikan manusia di dalam habitus kemanusiaan, itulah garapan formal dari ilmu pendidikan (Imam Barnadib, 2002:41).

Pendidikan adalah suatu lembaga dalam tiap-tiap masyarakat yang beradab, tetapi tujuan pendidikan tidaklah sama dalam setiap masyarakat. Sistem pendidikan suatu bangsa dan tujuan-tujuan pendidikannya didasarkan atas prinsip-prinsip, nilai-nilai, cita-cita dan filsafat yang berlaku dalam suatu bangsa (M. Noor Syam, 1980:3). Definisi di atas menekankan bahwa tujuan pendidikan bergantung nilai-nilai dan filsafat yang berlaku di suatu masyarakat. Hal tersebut berimplikasi juga pada sejarah pendidikan yang juga mengacu pada suatu filsafat yang berlaku di masyarakat pada saat sejarah berlangsung. Sejarah pendidikan memberi sumbangan dan memperkaya ilmu mendidik sistematis, karena atas dasar ilmu pendidikan sistematis memberikan pemikiran secara tersusun dan lengkap tentang masalah pendidikan (Sutari Imam Barnadib, 1962:19). Berikut ini dipaparkan beberapa tujuan pendidikan menurut para ahli:

- a. Crow and Crow, tujuan pendidikan mendorong anak didik untuk berfikir secara efektif, jernih, dan objektif dalam suasana yang bagaimanapun.
- b. MJ. Langeveld, tujuan pendidikan adalah terwujudnya manusia dewasa.
- c. Socrates, tujuan pendidikan adalah mengenali dirinya sendiri supaya dapat hidup dengan jiwa yang sehat, susila, dan bahagia. Pernyataan Socrates yang sangat terkenal adalah “kenalilah dirimu”.
- d. Plato, tujuan pendidikan adalah mencapai keadilan di dalam negara dengan pimpinan seorang raja bijaksana.
- e. Kohnstamn, tujuan pendidikan adalah untuk menolong manusia yang sedang berkembang, supaya ia dapat memperoleh perdamaian batin yang sedalam-dalamnya, tanpa menjadi beban orang lain.
- f. Jonas Cohn, tujuan pendidikan adalah membentuk anak didik supaya menjadi anggota masyarakat yang mandiri dalam masyarakat.
- g. Paul Haberlin, tujuan pendidikan adalah membentuk anak didik memiliki kecakapan batin, agar bisa memenuhi kewajiban, tugas hidupnya, dan tujuan hidupnya.
- h. John Dewey, tujuan pendidikan adalah untuk mencapai tujuan pendidikan lain yang lebih tinggi.
- i. Ki Hadjar Dewantara, tujuan pendidikan adalah untuk tercapinya kesempurnaan hidup pada anak didik.

- j. Notonagoro, tujuan pendidikan adalah tercapainya kebahagiaan sempurna, yakni dicapainya kepuasan yang tidak menimbulkan keinginan lagi dan bersifat kekal abadi (Arif Rohman 2009: 92).

Dari berbagai definisi tersebut tujuan pendidikan mencakup tiga hal: *Pertama* pengembangan individu, meliputi (1) berfikir efektif, jernih dan objektif, (2) kedewasaan, (3) jiwa yang sehat dan susila, (4) kedamaian dan kecakapan batin, (5) mandiri dan bertanggung jawab, serta (6) kesempurnaan hidup. *Kedua*, masyarakat meliputi (1) terwujudnya keadilan di dalam negara dengan pemimpin yang bijaksana, (2) kebahagiaan sempurna yang kekal abadi. *Ketiga*, tujuan lanjutan, yakni tercapainya sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi di kemudian hari.

Bangsa Indonesia telah beberapa kali berusaha memperbaiki upaya penyelenggaraan pendidikannya melalui perumusan tujuan pendidikan nasionalnya.

1. UU Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, UU Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pemberlakuan UU Nomor 4 Tahun 1950 untuk seluruh Indonesia. Kedua UU ini mengatur bagaimana sekolah diselenggarakan di Indonesia. Salah satu pasal yang mengatur tujuan pendidikan adalah bahwa penyelenggaraan sekolah bertujuan untuk mewujudkan sosok manusia Indonesia yang susila, cakap, demokratis dan bertanggung jawab.
2. UU Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi. Tujuan pendidikan di perguruan tinggi adalah (1) Membentuk manusia susila yang berjiwa Pancasila dan bertanggung jawab akan terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur, materiil dan spiritual; (2) Menyiapkan tenaga yang cakap untuk memangku jabatan yang memerlukan pendidikan tinggi dan yang cakap berdiri sendiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan; (3) Melakukan penelitian dan usaha kemajuan dalam lapangan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kehidupan kemasyarakatan.
3. Ketetapan MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966. Menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia Pancasila sejati.
4. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973. Menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia pembangunan yang berpancasila, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, mampu mengembangkan

- keaktivitas dan tanggung jawab, menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi, berbudi pekerti yang luhur, serta selalu mencintai bangsanya dan sesama manusia.
5. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 Tentang P4. Menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat membangun diri sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.
 6. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983, Tentang GBHN. Menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.
 7. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988, Tentang GBHN. Menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah mewujudkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, suka bekerja keras, tangguh dan mandiri, bertanggung jawab, cerdas dan terampil, sehat jasmani dan rohani, serta cinta tanah air.
 8. Ketetapan MPR Nomor II /MPR/1993, Tentang GBHN. Menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah mewujudkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, produktif, serta sehat jasmani rohani.
 9. UU Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

10. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Mencermati tujuan pendidikan nasional yang tertuang di dalam dokumen peraturan perundang-undangan dapat diketahui bahwa: *pertama*, pada umumnya tujuan pendidikan nasional dirumuskan secara idealis. Pendidikan selalu ingin diarahkan untuk mencapai suatu keadaan ideal dan serba sempurna akan tetapi belum pernah dapat dicapai dan terwujud sampai sekarang.

Kedua, indikasi sosok yang susila atau berbudi pekerti luhur, cakap dan terampil, serta bertanggung jawab adalah ciri-ciri sosok manusia Indonesia yang dicita-citakan yang ingin diwujudkan dalam beberapa kali rumusan tujuan pendidikan.

Ketiga, rumusan tujuan pendidikan disusun seiring dengan hasil idealisasi kebutuhan masyarakat ketika rumusan itu dibuat. Misalnya rumusan yang dibuat tahun 1950 dan 1954 idealisasi sosok manusia Indonesia adalah sosok manusia Indonesia yang susila, cakap, demokratis dan bertanggung jawab. Tentu saja itu mencerminkan kondisi Indonesia saat itu. Berbeda dengan UU Nomor 20 Tahun 2003, idealisasi manusia Indonesia adalah sosok yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini mengindikasikan bahwa sosok manusia yang dibutuhkan bangsa Indonesia di awal milenium ketiga ini lebih memiliki kemampuan lengkap (Arif Rohman 2009: 98).

Sejarah Pendidikan Nasional

Sejarah pendidikan telah berlangsung begitu panjang, sepanjang sejarah umat manusia itu sendiri, karena pendidikan dimulai sejak adanya manusia di dunia ini. Maka, menelaah sejarah pendidikan sebenarnya tidak lain adalah mengkaji sejarah manusia dalam rentang waktu masa lalu dalam periode dan tonggak-tonggak peradaban manusia.

Elmer H. Wilds dan Kenneth V. Lottich dalam bukunya *“The Foundations of Modern Education”* mengatakan bahwa sangat sulit untuk menentukan kapan pendidikan itu dimulai. Pendidikan itu setua kehidupan manusia itu sendiri. Pendidikan telah berlangsung sebelum manusia berbicara, menulis dan membahas tentang arti pendidikan (Agus Salim, 2007).

1. Pendidikan Sebelum Masa Kolonial

Perjalanan perkembangan pendidikan di Indonesia dapat ditelusuri sejak zaman Hindu dan Budha pada abad ke-5 Masehi. Pada masa pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha, pendidikan dipengaruhi ajaran kedua agama tersebut. Demikian pula pada masa awal Islam masuk ke Nusantara, pendidikan dan pengajaran pun mengalami penyesuaian dengan agama Islam.

Di daerah Kalimantan (Kutai) dan Jawa Barat (Tarumanegara) ditemukan prasasti adanya kebudayaan dan peradaban Hindu tertua. Dari sumber-sumber Cina yang berasal dari zaman Dinasti Tang, diketahui pada masa pemerintahan Ratu Simo (His-mo) di Ho-ling (di Jawa) telah ada seorang pendeta Budha yang terkenal bernama Janabhadra (Yoh-na-po-to-lo). Pendeta ini telah membantu seorang pendeta Cina bernama Hui-Ning menerjemahkan kitab suci agama Budha dari bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Cina.

Seorang pendeta Cina yang lain I Tsing, tinggal beberapa tahun di Sriwijaya. Dalam karyanya yang ditulis tahun 689, ia menyebutkan betapa mashurnya Sriwijaya sebagai pusat agama Budha. I Tsing menyebutkan bahwa di ibukota kerajaan Sriwijaya yang dikelilingi benteng terdapat lebih dari seribu orang pendeta yang belajar agama Budha.

Dalam agama Hindu, kaum Brahmana, adalah kaum ulama. Mereka adalah penyelenggara pendidikan dan pengajaran. Mereka mempelajari dan mengajarkan teologi, sastra, bahasa dan ilmu kemasyarakatan. Juga ilmu-ilmu dalam rumpun eksakta, seperti perbintangan, ilmu pasti, seni bangunan, seni rupa dan ilmu pengetahuan lainnya. Kebudayaan dan sistem pendidikan Hindu di India pada masa itulah yang sangat berpengaruh dan berkembang di Indonesia.

Dalam perkembangannya, kebudayaan Hindu membaaur dengan unsur-unsur Indonesia asli yang coraknya khas. Sampai kejatuhan kerajaan Hindu terakhir di Indonesia, yaitu Majapahit pada awal abad 16 M, ilmu pengetahuan terus berkembang,

khususnya bidang sastra, bahasa, ilmu pemerintahan, tata negara dan hukum. Kerajaan-kerajaan Hindu seperti Kalingga, Mataram, Kediri, Singosari (Agus Salim, 2007).

2 Pendidikan Masa Kolonial

Baru pada abad ke-17 pemerintah Hindia Belanda menyelenggarakan sistem pendidikan yang ditujukan untuk mendidik tenaga terampil yang dapat dipekerjakan di perusahaan-perusahaan mereka. Jenis pendidikan yang diselenggarakan meliputi: Pendidikan Dasar, Sekolah Latin, Pendidikan Teologia, Akademi Pelayaran dan Sekolah Cina. Ada beberapa tingkatan pendidikan yang menjadi peluang bagi pengembangan kelompok masyarakat pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Tingkatan pendidikan itu dimulai dari pendidikan rendah sampai pada tingkatan pendidikan menengah.

Pendidikan Rendah. Pendidikan dari sekolah rendah, diperuntukkan bagi anak-anak Belanda sendiri yang berada di Indonesia. Pendidikan sekolah rendah untuk masyarakat pribumi diselenggarakan dengan sangat terbatas, dan biasanya dilakukan di kota-kota besar.

Sekolah Rendah Berbahasa Belanda. Terdapat beberapa jenis sekolah yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Sekolah rendah Eropa untuk anak-anak kulit putih. Sekolah ini pertama kali didirikan tahun 1818, dengan masa pendidikan 7 tahun. Kadang sekolah ini juga menerima murid pribumi dari kelas sosial tinggi dan bangsa Timur Asing, seperti Cina, India, Arab.

Sekolah Bumi Putera Kelas I. Satuan pendidikan ini terdiri atas dua satuan pendukung, masing-masing Sekolah Cina-Belanda berdiri 1908, lama pendidikan 7 tahun dengan bahasa pengantar Belanda. Sekolah Rendah Bumi Putra yang diselenggarakan untuk anak-anak pribumi, baik dari kalangan bangsawan maupun pegawai negeri Belanda. Sekolah ini pertama kali didirikan pada tahun 1914 dengan lama pendidikan 7 tahun.

Sekolah Rendah Berbahasa Indonesia dan Daerah. Satuan pendidikan ini memiliki sekolah-sekolah sbb: (1) Sekolah Bumi Putra Kelas Dua yang diselenggarakan untuk masyarakat pribumi, dengan lama pendidikan 5 tahun. (2) Sekolah Desa, didirikan pertama kali tahun 1907, dengan lama pendidikan 3 tahun. (3) Sekolah Rendah Lanjutan Sekolah Desa, diperuntukkan bagi masyarakat desa dengan masa pendidikan 2 tahun. Pertama kali didirikan oleh pemerintah kolonial pada 1914 di hampir setiap kabupaten di

Jawa. Di kalangan masyarakat sekolah ini dikenal dengan sebutan sekolah ongko loro. (4) Sekolah Peralihan. Sekolah ini diselenggarakan untuk memberi kesempatan bagi murid-murid sekolah desa yang ingin meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Sekolah ini menggunakan pengantar bahasa Belanda. Lama pendidikan 5 tahun.

Sekolah Rendah Khusus bagi Masyarakat Ambon. Terdapat dua satuan pendidikan khusus diperuntukkan bagi masyarakat Ambon, masing-masing *Ambonshe School* dan *Ambonshe Soldaten School*. Jenis sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak pribumi keturunan Belanda. Sekolah ini sangat terbatas, di beberapa kota dan disekitar tangsi tentara kolonial, misalnya di kota Magelang, Jakarta, Padang, Semarang dan beberapa daerah lain.

Sekolah Rendah Khusus Anak Bangsawan. Sekolah ini didirikan pertama kali 1865 di Tondano. Dalam perkembangannya sekolah ini dihapus setelah berdiri sekolah bumi putra dan sekolah rendah Eropa. dari upaya untuk mendirikan sekolah yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, tampak jelas bahwa pemerintah Belanda sejak awal pendirian sekolah dari jenis sekolah rendah, telah melakukan diskriminasi yang ketat. Kelompok masyarakat Belanda yang ada di Indonesia mendapatkan pelayanan sekolah yang baik, disusul kelompok masyarakat Timur Asing, elit sosial pribumi, dan baru kemudian rakyat biasa. Sistem pendidikan yang diciptakan sebagai kebijaksanaan pemerintah kolonial telah menciptakan dan memupuk rasa rendah diri di kalangan golongan pribumi dengan memberi pendidikan yang bermutu rendah. Berangkat dari asumsi ini, pada awalnya tampak bila kaum pribumi tidak memiliki peluang yang baik dalam pendidikan formal. Tradisi berfikir rasional seperti apa yang dilakukan dalam pendidikan modern, belum menjadi tradisi yang jelas di kalangan masyarakat secara luas. Perlakuan diskriminatif ini juga terjadi di tingkat pendidikan menengah dan juga pendidikan tinggi.

Pendidikan Menengah. Pendidikan menengah atau *Meer Ultgebreid Loger Onderwijs* (MULO), adalah sekolah menengah satu-satunya pada zaman pemerintah kolonial Belanda. Dari nama yang digunakan jelas bahwa sekolah ini merupakan perluasan dari sekolah rendah, yang berarti sekolah lanjutan dari sekolah rendah. Bahasa pengantar yang digunakan dalam pembelajaran adalah bahasa Belanda. Sekolah ini pertama kali berdiri di Semarang dan Jakarta tahun 1914. Kemudian menyusul di

Surabaya, Magelang, Bandung dan Yogyakarta. Selanjutnya di luar Jawa seperti di Palembang, Manado dan Medan. Persyaratan yang dituntut untuk memasuki sekolah menengah ini adalah anak-anak pribumi dan anak-anak Timur Asing terutama keturunan Cina. Lama pendidikan di sekolah ini adalah 3 tahun. Khusus perlakuan terhadap anak-anak keturunan Eropa dan warga asing lainnya kebijakan pemerintah kolonial mendirikan sekolah warga negara asing yang dikenal dengan sebutan *Hogeen Burger School* atau HBS dan sekolah ini merupakan lanjutan dari sekolah rendah Eropa (*Europese Lager School*). HBS didirikan pertama kali pada tahun 1860, masa pendidikan selama 5 tahun dan menggunakan bahasa pengantar Belanda. Sekolah ini dilaksanakan dalam dua periode waktu, tiga tahun pertama masa pendidikan disebut juga dengan istilah "Gymnasium" dan dalam perkembangannya sekolah ini menjadi 5 tahun, dilaksanakan pertama kali tahun 1867. Sekolah ini dikenal dengan sebutan HBS (*Hoogere Burger School*).

Setingkat lebih tinggi dari sekolah menengah, pemerintah kolonial Belanda menyelenggarakan sekolah menengah umum, yakni *Algemene Middleboor School* (AMS) sebagai kelanjutan dari *Meer Uitgebreid Lager Orderweijis* (MULO). Sekolah ini didirikan pada tahun 1915 menggunakan bahasa Belanda sebagai pengantar. Sekolah ini memiliki dua jurusan yaitu bagian A adalah jurusan kebudayaan (*Cultur Witenchap*) dan bagian B untuk jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (*Natuur Witenchap*).

Disamping sekolah menengah dan sekolah rendah, di Indonesia juga dikembangkan jenis pendidikan tinggi. Pada tahun 1851, di Jakarta didirikan Sekolah Dokter Jawa yang kemudian pada tahun 1902 beralih nama menjadi *Shole Toot Oplaiding Van Indishe Artsen* (Stovia). (Agus Salim, 2007).

Di akhir abad 19 untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis dan para medis, didirikan sekolah dokter Jawa yang kemudian dikenal dengan STOVIA. Di beberapa lembaga kedinasan milik pemerintah kolonial, dibutuhkan tenaga spesialis menengah dalam kejuruan tertentu, baik tingkat menengah pertama maupun menengah atas (Sekolah Teknik, Sekolah Pertanian, Sekolah Peternakan, Sekolah Kehutanan, Sekolah Dagang dan sekolah Hukum). Sekolah-sekolah itu menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar.

Perkembangan bidang pengajaran, terjadi pada dua dasa warsa pertama abad ke-20 ketika didirikan Sekolah Tinggi pertama kali. Pada tahun 1922 didirikan *Technische Hoge School* (THS) di Bandung, menyusul kemudian Sekolah Tinggi Kedokteran *Geneeskundige Hoge School* (GHS) pada tahun 1927 di Jakarta dan Pendidikan Tinggi Hukum disebut *Rechts Hoge School* (RHS) pada tahun 1924 juga di Jakarta. Pada tahun 1941 dibuka *Landbouw Hoge School* dan pada tahun 1940 didirikan *Faculteit der Letteren* di Jakarta juga. Dengan berdirinya banyak perguruan tinggi di tanah air, maka pengajaran diusahakan mengikuti kurikulum yang dikembangkan di negeri Belanda, sehingga dengan sistem persamaan dapat meneruskan pelajarannya sampai ke negeri Belanda. sehingga pada awal abad ke-20, kemudian banyak dilakukan pengiriman mahasiswa program pascasarjana di negeri Belanda untuk bidang-bidang yang lebih luas. Jenis pendidikan formal lain yang ada di tanah air juga berkembang pesat, dengan didirikannya jenis lembaga pendidikan kejuruan yang cukup beragam.

Perkembangan pendidikan di tanah air pada awal abad 20, menciptakan kelompok kelas menengah baru akibat akumulasi tenaga terdidik dan profesional. Hal ini wajar dalam tataran evolusi sosial pada fase menginjak komersialisasi, industrialisasi, dan birokratisasi. dengan demikian tercipta kelas sosial baru yang tidak mempunyai tempat pada strata tertentu menurut stratifikasi sosial masyarakat tradisional. Kaum terpelajar memasuki posisi terhormat, kaum intelektual kelas menengah baru muncul setelah perguruan tinggi mengeluarkan tamatan yang dengan derajat akademinya tidak masuk birokrasi, tetapi tetap menjalankan profesinya secara swasta. Dari kelompok itulah kemudian muncul pemimpin gerakan nasional.

Pendidikan di zaman pergerakan nasional, sangat berpengaruh terhadap tumbuhnya nasionalisme di kalangan kaum muda. Berkenaan dengan hal ini beberapa lembaga pendidikan yang lahir pada masa pergerakan, di antaranya Sekolah Kartini (Jepara), Taman Siswa (Yogyakarta), dan Kayu Tanam (Padang). Ada hubungan yang cukup signifikan antara berdirinya Yayasan Pendidikan Taman Siswa dengan tumbuhnya nasionalisme di Indonesia (Yulius Adi Utomo. 1981).

Pendudukan pemerintah militer Jepang di Indonesia sejak 1942-1945 membawa perubahan di berbagai sektor kehidupan. Meskipun perubahan itu tidak banyak, namun

kalangan ahli menyatakan bahwa pada masa ini bidang pendidikan telah mengalami perubahan titik pandang yang menguntungkan bagi bangsa Indonesia.

Tujuan pendidikan pada awalnya memang merupakan alat propaganda pemerintah Jepang untuk meraih kemenangan dalam perang Asia Timur Raya. Banyak sekolah yang didirikan pemerintah Belanda dibekukan. Pemerintah Jepang juga melarang penggunaan bahasa Belanda sebagai pengantar pembelajaran. Sampai taraf tertentu kebijakan ini menguntungkan perkembangan bahasa Indonesia sebagai pengantar. Namun di sisi lain pemerintah Jepang juga meningkatkan latihan pendidikan jasmani dan mempersingkat waktu sekolah untuk membentuk sukarelawan pribumi dalam rangka perang Asia Timur Raya.

Beberapa jenis sekolah yang berkembang pada zaman penjajahan Jepang, meliputi *koo mumin gakkoo* (sekolah rakyat 6 tahun), *djan sihan gakko* (SGB), dan *kotto sihan gakko* (SGA). Lembaga sekolah yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar sangat diminati kaum pribumi, sampai menjelang masa revolusi fisik sekolah tersebut dibanjiri oleh kelompok usia muda terutama di daerah pinggiran kota dan kota-kota kabupaten di Jawa.

Pemerintah Jepang secara fisik tidak banyak menambah jumlah sekolah, tetapi perubahan terjadi pada pembalikan asumsi awal yang menyatakan bahwa kemajuan hanya dapat dicapai dengan model rasionalisme Barat karena pola pikir Timur pun memiliki peluang yang sama untuk mengendalikan perubahan. Kemenangan Jepang atas Barat itu kemudian menimbulkan rasa percaya diri di kalangan bangsa-bangsa terjajah untuk menuntut persamaan hak dan kemerdekaan mereka di Asia dan Afrika. (Yulius Adi Utomo, 1981).

3. Pendidikan Setelah Kemerdekaan

Pada masa awal kemerdekaan, pendidikan menjadi sarana mobilitas sosial di kalangan masyarakat pribumi. Kelompok masyarakat terdidik yang sudah ada sejak zaman Belanda menjadi kelompok pertama yang menikmati posisi utama dalam struktur masyarakat. Mereka adalah kelompok pegawai pertama pribumi yang mengisi jabatan birokrasi pemerintahan di Indonesia.

Akumulasi masyarakat terdidik pada masa awal kemerdekaan kemudian menjadi motor penggerak perubahan masyarakat. Pendidikan keagamaan yang tadinya

mendominasi corak pendidikan pribumi pada masa sebelum revolusi bersenjata, pada akhirnya pun tampak bergeser ke arah sekuler. Pendidikan pesantren banyak mengalami kendala. Dalam perkembangannya satu persatu jenis pesantren yang diasuh ulama yang kurang kuat kemudian berubah menjelma menjadi pendidikan madrasah yang menerima kurikulum sekolah umum. Lewat saluran politik, para santri menjalin hubungan dengan pemerintah republik yang memungkinkan mereka membangun gedung dengan ruang kelas modern dan asrama untuk para santri. Tetapi model pendidikan pesantren dan madrasah tetap memiliki identitasnya yang lama, yaitu wadah pendidikan bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah (Agus Salim, 2007).

Pada masa pemerintahan Soekarno, upaya pembangunan pendidikan dilakukan dengan dukungan berbagai lembaga swasta yang didirikan kelompok masyarakat, partai politik, berbagai aliran ideologi dan agama. Dukungan masyarakat sangat dibutuhkan pada saat itu, karena pihak pemerintah belum mampu menyediakan sarana pendukung untuk membangun pendidikan.

Lembaga pendidikan sekolah di awal tahun 1950 sampai tahun 1960-an, mengalami penurunan kualitas yang cukup signifikan. Banyak tenaga lulusan sekolah yang potensial tidak lagi tertarik menjadi guru. Mereka terjun ke politik dan birokrat yang lebih menjanjikan masa depan. Animo untuk memasuki sekolah guru mulai surut. Sekolah guru hanya diminati keluarga-keluarga dari pedesaan. Jatuhnya nilai mata uang pada saat itu, membuat banyak tenaga pengajar sering mengabaikan pekerjaan utamanya untuk mencari hasil tambahan (Agus Salim, 2007).

Pada era Orde Baru, pendidikan mengalami perkembangan pesat. Pemerintahan Soeharto melakukan pembangunan nasional, menempatkan pendidikan dalam skala prioritas utama. Meskipun anggaran untuk sektor pendidikan masih terbatas, tetapi semangat untuk melakukan pemerataan kesempatan pendidikan sangat jelas dilakukan. Banyak proyek fisik dalam bentuk pembangunan gedung sekolah baru lewat Inpres, pengangkatan guru, pemberian fasilitas laboratorium, dan pemberlakuan kurikulum baru memberikan nuansa dalam pembangunan pendidikan di tanah air.

Sekolah guru pada masa ini mendapat prioritas pengembangan. Tetapi sekolah pendidikan guru untuk tingkat dasar dan menengah tidak mendapatkan input yang menggembirakan. Rerata murid SPG dan Mahasiswa IKIP berasal dari keluarga

menengah dan miskin pedesaan. Mereka hanya memiliki tingkat kecerdasan rata-rata dan bukan anak-anak terbaik di negeri ini. Anak-anak cerdas dari keluarga menengah atas lebih tertarik untuk bekerja di sektor ekonomi dan konstruksi yang memiliki peluang dan masa depan yang sangat baik di banding bila mereka menjadi guru.

Pemerintah Soeharto telah merepresi tumbuhnya ideologi lain selain Pancasila, terutama Islam Garis Keras dan Komunisme. Jenis pendidikan pesantren diawasi secara ketat. Departemen agama mengampu tugas untuk sebanyak mungkin mengajak pesantren menerima kurikulum sekuler dalam bentuk madrasah-madrasah yang mereka kelola.

Selama pemerintahan Soeharto, kekuatan pendidikan nasional mengalami pergeseran. Beberapa perubahan antara lain adanya kemerosotan rasa pengabdian di kalangan komunitas pendidikan sebagai akibat berlakunya “proyek pembangunan” yang mengutamakan target fisik. Masyarakat juga semakin dikejutkan oleh masalah-masalah pendidikan yang semakin luas dan membutuhkan perhatian intensif. Masalah-masalah itu seperti, ijazah palsu, perkelaian pelajar, maraknya pecandu narkoba di kalangan pelajar, komersialisasi bimbingan belajar, perguruan tinggi liar, pembajakan soal ujian, dan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. (Wardiman Djojonegoro, 1996).

Masa reformasi, masing-masing pada era Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono, belum menampilkan kebijakan yang jelas dalam membangun pendidikan di Indonesia. Ketiga pemerintahan terakhir masih melanjutkan kebijakan lama. Dalam satu dasawarsa terakhir, banyak pemilik modal mendirikan sekolah unggulan bagi kalangan menengah atas. Situasi ini memiliki arti positif, tetapi sekaligus mengandung makna negatif dalam perkembangan pembangunan pendidikan di Indonesia. Mungkin pada masa mendatang akan tercipta satu lapis masyarakat terdidik, modern, dan profesional yang dapat merespon perkembangan dunia yang semakin kompetitif. Tetapi fenomena itu hanya berarti bagi kelompok masyarakat tertentu, bagi masyarakat yang lebih luas pendidikan masih menjadi barang mahal yang sulit dijangkau oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia.

Pendidikan di era reformasi, diusahakan oleh banyak pemerintah daerah untuk meningkatkan APBD bagi anggaran pendidikan hingga mencapai 20%. Pemerintah pusat juga berusaha meningkatkan anggaran pendidikan, tahun 2009 pemerintah mengalokasikan 20% APBN untuk pendidikan. Masih banyak kebijakan pendidikan yang

ditentukan oleh pemerintah pusat. Sebagai contoh masalah ujian nasional yang masih merupakan indikator berkuasanya birokrasi negara sehingga merendahkan sekolah sebagai kekuatan lokal (Agus Salim, 2007).

Daftar Pustaka

- Agus Salim. (2007). *Indonesia Belajarlah (Membangun Pendidikan Indonesia)*. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
- Agystiar Syah. (2001). *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*. Bandung: Penerbit Lubuk Agung.
- Ahmad Syafii Maarif. (2004). *Pentingnya Pendidikan Moral bagi Sebuah Bangsa*. Yogyakarta: Pidato Dies FISE, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Arif Rohman. (2009). *Memahami Pendidikan dan Ilmu pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Darmaningtyas. (2004). *Pendidikan Yang Memiskinkan*. Yogyakarta: Galang Press.
- Depdikbud. (1950). *Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1950 dan Nomor 12 Tahun 1954 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah*.
- (1989). *Undang-undang RI Nomor 2, tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- (2003). *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional*.
- (2005). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Drijarkara. (1980). *Tentang Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Drost, S.J. (1998). *Sekolah-Mengajar atau Mendidik?*. Yogyakarta: Kanisius-Universitas Sanata Dharma.
- I Jumbuh dan H. Danasaputra. (1976). *Sejarah Pendidikan*. Bandung: Penerbit CV Ilmu.
- Imam Barnadib. (1982). *Arti dan Metode Sejarah Pendidikan*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit FIP IKIP Yogyakarta
- M. Said, Dahlan, Mansur. (1970). *Mendidik dari Zaman ke Zaman*. Bandung: Penerbit CV Ilmu.
- Noeng Muhadjir. (2003). *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial – Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin.
- Sutari Imam Barnadib (1982). *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*. Yogyakarta: FIP IKIP Yogyakarta.
- Tilaar, H.A.R. (1999). *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia : Strategi Reformasi Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- (2005). *Manifesto Pendidikan Nasional. Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Wardiman Djoyonegoro. (1996). *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Depdikbud.
- Yulius Adi Utomo. (1981). *Sejarah Pendidikan Nasional*. Semarang: Penerbit Don Bosco.
- Zamroni. (2001). *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Jakarta: Bigraf Publishing.